



PROPOSAL KAJIAN

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SUNGAI JENEBERANG
SEBAGAI DAYA TARIK WISATA MARITIM
DI KOTA MAKASSAR**

Oleh :

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.CHE
Muhammad Arfin M. Salim, M.Pd, Ph.D.CHE
Muhammad Musawantoro, S.Pd., M.Pd
Masri Ridwan, S.Pd., MPd.
Muh. Zainuddin Badollahi, S.Sos., M.Si

POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat yang telah dilimpahkan-Nya sehingga proposal penelitian ini dapat kami ajukan. Proposal ini disusun sebagai perwujudan dari peran perguruan tinggi untuk berkolaborasi mengembangkan potensi daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.

Politeknik Pariwisata Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memiliki fungsi dan peran signifikan dalam melakukan kajian terapan pariwisata yang dapat menjadi salah satu referensi bagi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan daerah.

Keberadaan muara sungai Jeneberang sebagai salah satu sungai terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam dan sejarah yang sangat menarik dan sampai saat ini belum dioptimalkan pemanfaatannya, khususnya sebagai daya tarik wisata kemaritiman. Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal oleh dunia internasional sebagai pelaut ulung merupakan salah satu potensi besar yang harus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Proposal ini disusun untuk mengembangkan sebuah desain pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman dengan integrasi antara

aktivitas wisata sungai, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam gugusan kepulauan Spearmonde sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kota Makassar dalam mengembangkan kepariwisataan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Peneliti menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh sebuah dokumen Rencana Induk Pengembangan Sungai Jeneberang sebagai Destinasi Wisata Maritim sehingga menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terkait dalam pengembangan dan pembangunannya menjadi destinasi wisata provinsi Sulawesi Selatan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Makassar, Juli 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Bab I Pendahuluan	
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah Penelitian	14
C Tujuan Penelitian	15
D Manfaat Penelitian	15
Bab II Tinjauan Pustaka	
A Pengertian Pariwisata	16
B Pariwisata Bahari	40
C Kawasan Pariwisata	45
D Rancangan Keruangan	57
E Konsep Pengembangan Wilayah Sungai Sebagai Daya Tarik Wisata	62
F Kerangka Konseptual	68
Bab III Metode Penelitian	
A Jenis Penelitian	70
B Lokasi Penelitian	70
C Informan Penelitian	71
D Jenis Data	73
E Teknik Pengumpulan Data	74
F Teknik Analisis Data	75
Daftar Pustaka	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan pariwisata kota Makassar sebagai destinasi wisata unggulan provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari potensi alam, sejarah dan budaya yang cukup dikenal sehingga dalam pengembangannya membutuhkan sebuah perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana wilayah kota Makassar serta provinsi Sulawesi Selatan.

Roadmap dan strategi pengembangan destinasi pariwisata nasional yang memposisikan provinsi Sulawesi Selatan sebagai destinasi unggulan di luar Jawa-Bali sekaligus menempatkan kota Makassar, kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara dan kabupaten Luwu pada *cluster 3* pengembangan destinasi unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pelibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata menjadi suatu keharusan mengingat pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan bersinggungan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, seperti amenities wisata berupa penyediaan jaringan listrik, penyediaan jalan, penyediaan air bersih dan penyediaan sarana telekomunikasi.

Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 5.950 daerah aliran sungai dan 70% diantaranya telah tercemar yang diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan sanitasi.

Perilaku manusia yang menyumbangkan pencemaran sungai antara lain kebiasaan membuang sampah dan hajat di sungai. Selain itu tinja yang diserap oleh mobil tangki langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Di sisi lain, sungai masih menjadi tempat kegiatan masyarakat seperti mandi dan mencuci. Perusahaan seperti PDAM juga mengambil air baku untuk minum dari sungai (Fathony dkk,2014).

Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah salah satu pemasok air terbesar untuk kebutuhan makhluk hidup seperti untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan obyek wisata sungai. Wisata sungai (*river tourism*) dapat menjadi penyumbang ekonomi negara, daerah dan masyarakat apabila dikelola dengan baik. Pengelolaan wisata sungai di Indonesia belum sebesar daya tarik wisata lainnya. Di negara-negara maju seperti Australia, Selandia Baru, negara-negara Eropa, hingga Kanada dan Amerika telah menjadikan sungai sebagai daya tarik wisata, sehingga selain menjadi sumber perekonomian juga akan menjaga kelestarian ekosistem sungai yang terjaga dan terpelihara.

Salah satu potensi daya tarik wisata alam yang dimiliki oleh kota Makassar adalah sungai, pantai, dan kanal yang selama ini belum dioptimalkan pengembangannya dalam konstruksi pariwisata sehingga keberadaannya secara natural belum berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat. Pembangunan pariwisata bahari dan pantai pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan

memanfaatkan potensi objek serta daya tarik sumberdaya di kawasan pesisir dan lautan Indonesia, berupa kekayaan alam yang indah seperti tepi laut yang landai dan berpasir putih, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang serta bermacam tipe ikan hias (Wright, 2015).

Pada kawasan pesisir tepi laut Kota Makassar terdapat 3 komponen ekosistem yakni estuari, mangrove dan terumbu karang. Ekosistem estuari berada di muara sungai Jeneberang dan aliran pasang surut. Ekosistem mangrove banyak dipengaruhi oleh ekosistem estuari sehingga keberadaannya di pantai kota Makassar berasosiasi dengan ekosistem estuari, khususnya di muara sungai Tallo. Ekosistem terumbu karang mendominasi seluruh gugusan pulau yang berada di perairan Makassar, termasuk dalam kelompok kepulauan Spermonde (PRWLSDNH, 2004).

Sungai di kawasan perkotaan adalah suatu ekosistem natural yang berguna meningkatkan kualitas estetika dan kenyamanan alami kota, bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi penduduk melalui aktivitas pariwisata. Kota Makassar merupakan wilayah dengan variasi potensi alam, sejarah dan budaya yang lengkap. Keanekaragaman tersebut berupa sungai, laut, pulau, pantai, pesisir, kanal, tinggalan sejarah dan budaya, berupa kawasan pelabuhan, industri, permukiman, dan aktivitas wisata. Secara langsung maupun tidak langsung, jenis kegiatan yang berada di wilayah ini telah merubah tipe pantai, disamping perubahan yang diakibatkan oleh dinamika alami pesisir. Dua sungai besar mengapit kota Makassar ialah

Sungai Tallo yang bermuara disebelah utara kota serta Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota (PRWLSDNH, 2004).

Wilayah pesisir yang berdasarkan sejarah merupakan titik tumbuh Kota Makassar. Kota Makassar, memiliki areal seluas 175,77 kilometer persegi dengan panjang pesisir mencapai $\pm 35,52$ km (PERDA RTRW Makassar 2005-2035), wilayah pesisir kota Makassar menyediakan sumberdaya alam yang produktif bagi sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Hal tersebut memberikan konsekuensi bagi pemerintah kota Makassar untuk mengelola berbagai potensi yang ada khususnya wilayah pesisir serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi.

Kendala di wilayah pesisir antara lain munculnya permukiman kumuh dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada sehingga tantangan yang dihadapi dimasa mendatang adalah menjadikan wilayah pesisir kota Makassar lebih tertata dengan pengelolaan lingkungan dalam wilayah pesisir sesuai secara terencana, rasional, bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan kawasan pesisir bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut harus sejalan dengan visi pemerintah kota Makassar yaitu menjadikan kota Makassar sebagai kota dunia yang *sombere'* dan *smart*.

Arahan dari Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2035. Pada zona muara Sungai Jeneberang terdapat beberapa pemanfaatan ruang yang diarahkan pada rencana tata ruang kota, pemanfaatan ruang tersebut seperti kawasan campuran bisnis yang luasnya 68,73%. Selanjutnya terdapat kawasan perdagangan dan jasa, permukiman kepadatan rendah, ruang terbuka hijau, sempadan danau, sungai dan wisata (Ali dkk, 2017).

Salah satu wilayah aliran sungai (DAS) yang peranannya sangat strategis di Sulawesi Selatan adalah DAS Jeneberang yang dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman dan pertanian yang menjadi pemasok bahan pangan bagi penduduk, khususnya yang tinggal di sekitarnya. Delta Sungai Jeneberang merupakan daratan yang terbentuk pada muara Sungai Jeneberang yang terletak di sebelah barat kota Makassar. Sungai Jeneberang sendiri merupakan salah satu sungai besar di Sulawesi Selatan dengan pola aliran dendritik. Hulu sungai berada pada Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa sedangkan bagian hilir bermuara di Selat Makassar (Whitten, 1987). Pada muara Sungai Jeneberang terbentuk delta yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Selain sebagai daerah resapan, kawasan delta Sungai Jeneberang sejak tahun 2000 secara intensif dikembangkan untuk permukiman, pusat bisnis dan pariwisata bahari.

Secara umum pemakaian lahan yang ada di DAS Jeneberang ialah kawasan hutan, persawahan, semak belukar, perkebunan lahan kering,

pemukiman, zona air payau serta Bendungan Bili bili. Pemakaian lahan di bagian hulu DAS Jeneberang ialah kawasan hutan, semak belukar, lahan kering, persawahan serta pemukiman. Daerah hulu DAS jeneberang ialah bagian dari DAS Jeneberang, yang terdaftar sebagai prioritas penindakan konservasi tanah. Hulu DAS Jeneberang ini sangat berfungsi dalam pemasok udara untuk bagian tengah DAS Jeneberang dan mempengaruhi besarnya sedimentasi untuk wilayah hilir. Tetapi dengan pertimbangan sosial ekonomi dimana masih terdapat masyarakat yang menggantungkan hidupnya di dekat hulu DAS jeneberang dengan melakukan pertanian lahan kering serta persawahan bahkan masih terdapat yang bermukim maka wilayah arahan zonasi pemakaian lahan dibagian hulu ialah daerah konservasi 60%, wilayah penyangga 20%, wilayah budidaya permanen 10%, dan daerah budidaya tahunan 10% (Suleman et al., 2016)

Sungai di wilayah Kota Makassar yang mengalir sepanjang tahun dan tidak pernah kering menjadikan masyarakat memanfaatkan potensinya untuk kesejahteraan warga sepanjang sungai yang dialirinya. Kawasan DAS Jeneberang yang memiliki ketinggian di atas 2.833 mdpl, Sungai Jeneberang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 860 km². Sedangkan luas wilayah sungai mencapai 9.331 km² dengan potensi air permukaan 13.229 Juta³/ tahun dan potensi air tanah 1.504 Juta³/ tahun dan potensi air tanah 1.504 Juta³/ tahun (Ali et al., 2017). Sungai Jeneberang melintasi kota Makassar, kabupaten Maros, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar, kabupaten Jeneponto, kabupaten

Bantaeng, kabupaten Bulukumba, kabupaten Selayar dan kabupaten Sinjai merupakan daerah yang sejuk dengan landsekap yang indah. Dengan kondisi hutan dan sungai yang cukup hijau, serta kontur yang berbukit-bukit, dan bermuara di selat Makassar menjadikan keindahan wilayah ini memiliki potensi sebagai daya tarik wisata.

Aliran sungai Jeneberang yang cukup tenang menjadikannya sangat cocok untuk dikembangkan sebagai tempat wisata sungai yang dapat diintegrasikan dengan daya tarik wisata lain seperti wisata sejarah, budaya, dan minat khusus. Pemerintah Daerah dan masyarakat kota Makassar saat ini mulai mengembangkan potensi aliran laut, pulau, pantai, pesisir, sungai, danau dan kanal sebagai bagian dari kebijakan pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan *water front city*.

Kondisi dan potensi kerusakan DAS dipicu oleh pergantian tata guna lahan akibat meningkatnya tingkatan kebutuhan hidup manusia. Pemakaian lahan ialah wujud intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka penuhi kebutuhan hidupnya, baik materil ataupun spiritual. Pertumbuhan lahan ditetapkan oleh proses pelapukan dan perkembangan tanah, erosi, gerakan massa tanah, banjir, sedimentasi, serta biologi termasuk manusia. Pergantian lahan mempengaruhi terhadap keadaan, tata air (hidrologi), potensi bencana semacam banjir, erosi, serta longsor, vegetasi, dan kegiatan manusia dalam bidang pertanian, dorongan, kerekayasaan, industri, wisata, serta pertambangan.

Pada bagian tengah DAS Jeneberang, banyak penambangan pasir yang tidak mengikuti kaidah lingkungan yang mengubah morfologi sungai dan merusak bangunan penahan sedimentasi. Sedangkan di bagian muaranya, bantaran sungai yang terbentuk dari delta atau sedimentasi, menjadi tempat tinggal warga. Untuk menanggulangi permasalahan DAS Jeneberang perlu dilakukan secara struktural serta kultural (non struktural). Secara struktural seluruh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam pengelolaan DAS baik pemerintah, LSM maupun masyarakat wajib berperan dalam pengelolaan serta pemantauan. Terdapatnya penguatan kebijakan khususnya dibagian hulu yang dijadikan sebagai wilayah konservasi. Karena sumber kehancuran DAS terletak di hulu yang akan berdampak hingga ke hilir.

Salah satu cara pengelolaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui pendekatan wilayah ekologis DAS (Suryanto, 2007). Namun demikian, pengelolaan sumberdaya alam tidak selalu mempertimbangkan daya dukung suatu wilayah, dimana terjadi pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan yang telah mengakibatkan kerusakan dan kekritisian dalam DAS sehingga mempengaruhi daya dukung DAS (Mawardi, 2010).

Peran strategis DAS sebagai unit perencanaan dan pengelolaan sumberdaya semakin nyata pada saat DAS tidak dapat berfungsi optimal sebagai media pengatur tata air dan penjamin kualitas air yang

dicerminkan dengan terjadinya banjir, kekeringan dan sedimentasi yang tinggi. Dalam prosesnya, maka kejadian-kejadian tersebut merupakan fenomena yang timbul sebagai akibat dari terganggunya fungsi DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologi yang melibatkan kompleksitas proses yang berlaku pada DAS. Salah satu indikator dominan yang menyebabkan terganggunya fungsi hidrologi DAS adalah terbentuknya lahan kritis. Dari hasil inventarisasi lahan kritis menunjukkan bahwa terdapat + 14,4 juta hektar di luar kawasan hutan dan + 8,3 juta hektar di dalam kawasan hutan (Pasaribu, 1999).

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi DAS yang mengakibatkan buruk seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu, diperlukan perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Dengan demikian bila ada bencana, apakah itu banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) disebutkan bahwa sempadan sungai merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kawasan

Perkotaan. Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat beraktivitas, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Tumbuhan dan tanaman merupakan komponen vegetasi dimana pengertian vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah. (Anonim, 2007). Sehingga analisis sumber daya sungai Jeneberang dari aspek vegetasi akan digunakan dengan aspek manfaat ekologi, sosial ekonomi budaya dan pariwisata.

Analisis pengembangan wisata daerah aliran sungai Jeberang akan terkait dengan daya tarik wisatwan berdasarkan jumlah faktor-faktor daya tarik wisata. Faktor ketiga untuk mengetahui keberadaan yang kemudian perlu dianalisis manfaatnya sebagai dasar perencanaan wisata di kawasan daerah aliran sungai Jeneberang (Haryono, 1979; Merigi, 2007; Rosadi, 2009).

Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengurangi dan menghadapi permasalahan sumber daya air baik dari

segi kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan ini oleh karenanya merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan lingkungan yang didasarkan pada data akademis maupun teknis, beragamnya kondisi lingkungan pada beberapa daerah dan perkembangan ekonomi dan sosial sebagai sebagai suatu keseluruhan dimana perkembangan daerah.

Dinamika yang terjadi dalam suatu DAS, baik yang terjadi akibat intervensi manusia ataupun proses alami mengakibatkan tekanan terhadap daya dukung DAS. Apabila tekanan tersebut melampaui daya dukung DAS maka dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan lingkungan seperti banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, tanah longsor, dan permasalahan lingkungan lainnya. Permasalahan DAS tersebut umumnya terjadi akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya. Daya dukung DAS merupakan aspek penting yang menjadi kajian dalam pengelolaan DAS. Daya dukung DAS dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan DAS dalam mendukung pemenuhan kebutuhan manusia dan sumberdaya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terbatas dalam suatu DAS tidak mungkin tercapai karena keterbatasan sumberdaya, maka daya dukung DAS adalah ukuran keterbatasan tersebut (Hui, 2015).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6, Tahun 2006, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar, pasal 8 ayat 3, Wilayah Pengembangan (WP) III Pusat Kota, tepatnya berada pada sebelah Barat Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan Pantai

Losari dan batas bagian atas Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga). Dasar kebijakan utama mengarah pada kegiatan revitalisasi kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan pemerintahan, serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan kota yang tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan atau bangunan cagar budaya.

Penataan Ruang Tepi Sungai Jeneberang Parangtambung Makassar Sebagai Objek Wisata adalah suatu proses atau tahap perancangan yang diawali oleh gagasan sampai terwujudnya suatu titik awal yang berupa konsep penataan ruang sebagai objek wisata . Desain ini menggunakan konsep modern, sebuah konsep desain yang mengambil bentuk dari unsur atau ciri khas daerah Sulawesi Selatan baik dari rumah adat atau unsur lain yang ada di daerah Sulawesi Selatan dan ditransformasi menjadi bentuk yang baru.

Pada sempadan yang dijadikan posisi desain lansekap, banyak terbentuk kegiatan yang dilakukan warga setempat dengan menggunakan sempadan sungai yang tidak terawat serta ditumbuhi tumbuhan semak selaku tempat beraktifitas, semacam tempat berkumpul di sore hari, menikmati indahnya matahari terbenam. Terdapat pula yang menjadikannya selaku sarana berolahraga. Tetapi, terdapat pula kegiatan dari warga yang bertabiat mengganggu area, karena membuang sampah di wilayah aliran sungai. Kegiatan tersebut bisa mengganggu ekosistem

mahluk hidup yang terdapat di posisi tersebut. Sempadan sungai yang dijadikan desain penyusunan ruang terletak di Jalan Dg Tata, Parangtambung.

Dengan demikian, sungai bukan merupakan objek untuk manusia berbuat hal negatif melainkan untuk kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan kesadaran seluruh pihak dalam memanfaatkan semua infrastruktur serta fasilitas dengan baik agar mampu membuat sungai Jeneberang ini menjadi destinasi wisata andalan kota Makassar.

Sebagai bentuk daya dukung wisata pada tahun 2020 Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan mengadakan Jeneberang *river festival* bekerjasama dengan beberapa seniman kota Makassar, dalam kegiatan ini ditampilkan posisi sungai Jeneberang sebagai sentral perdagangan dan pelayaran pada masa kejayaan kerajaan Gowa-Tallo, dalam kegiatan ini juga ditampilkan ritual *Appanaung Ri Je'ne* dimana wisatawan diajak berkeliling menggunakan perahu untuk menyusuri sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata potensial karena lokasinya yang strategis serta menyimpan jejak sejarah dan budaya Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar.

Selain itu, Politeknik Pariwisata Makassar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah ditetapkan sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) wisata bahari, sehingga

secara khusus bertanggungjawab dalam melakukan kajian serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal pengembangan potensi wisata maritim. Untuk itu, sinkronisasi antara tugas pokok Politeknik Pariwisata Makassar dengan perwujudan visi, misi dan program prioritas provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar khususnya dalam mengembangkan potensi sungai Jeneberang menjadi salah satu tema utama pelaksanaan penelitian ilmiah Politeknik Pariwisata Makassar, sehingga mengangkat judul **“Rencana Induk Pengembangan Sungai Jeneberang Sebagai Destinasi Wisata Maritim di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi Sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata maritim di Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk pola perjalanan wisata yang ideal untuk dikembangkan pada Sungai Jeneberang?
3. Bagaimana disain pengembangan Sungai Jeneberang Sebagai DTW maritim di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana potensi Sungai Jeneberang sebagai daya tarik wisata maritim di Kota Makassar.
2. Mengetahui bentuk pola perjalanan wisata yang ideal untuk dikembangkan di Sungai Jeneberang.
3. Mengetahui disain pengembangan Sungai Jeneberang Sebagai DTW maritim di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pengembangan dan pembangunan destinasi wisata maritim di provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kualitas destinasi wisata maritim di provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk didalamnya, dapat menjadi rujukan bagi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan dan Jeneberang dalam pengembangan destinasi wisata berbasis sungai di Sulawesi Selatan.

3. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pengembangan dan pembangunan destinasi wisata berbasis bahari pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi Sulawesi Selatan.
4. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk mendorong pengembangan dan pembangunan destinasi wisata maritim berbasis bahari pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bagi Pemerintah Kota Makassar, penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk OPD dalam mendukung kebijakan kepariwisataan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan Kota Makassar sebagai *waterfront city* yang canangkan Pemerintah Kota Makassar.
6. Bagi Politeknik Pariwisata Makassar, penelitian ini menghasilkan rekomendasi dalam mengintegrasikan rencana pengembangan Kampus Poltekpar Makassar dalam mendukung kebijakan kepariwisataan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata maritim berbasis bahari pada kawasan Sungai Jeneberang.
7. Bagi Masyarakat, keberadaan muara jeneberang sebagai destinasi wisata akan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan taraf ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Konsep dasar dan legalitas pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana batasan pariwisata ditetapkan sebagai berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusia ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan tujuan perjalanannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.

Marpaung (2002), menyatakan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan rutинnya atau juga tempat kediamannya. Sedangkan menurut WTO (1991), yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Lebih lanjut Soekadijo (2000) mengatakan bahwa sektor pariwisata adalah segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Karena pariwisata terdiri atas berbagai kegiatan organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan, seperti angkutan wisata, akomodasi, atraksi manusia dan daya tarik alam,

jasa perseorangan serta jasa pemerintah, hal ini mengakibatkan sektor pariwisata sering disebut dengan industri pariwisata (Bull, 1991).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penting yang terdapat dalam konsep pariwisata adalah adanya perjalanan yang dilakukan baik secara perseorangan maupun kelompok dari suatu tempat yang bukan merupakan tempat tinggalnya ke tempat yang lain yang sifatnya sementara dan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan dari berekreasi maupun untuk mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam sementara waktu, yang disebut destinasi pariwisata.

1. Definisi Destinasi Wisata

Menurut WTO (2007), destinasi wisata (*tourism destination*) merupakan daya tarik obyek wisata yang menjadi pilihan wisatawan. Terdapat paling sedikit tiga perspektif yang dapat dikenali dari destinasi wisata yaitu (1) wilayah geografik tertentu yang menjadi obyek kunjungan yang bersifat temporer, (2) aktivitas ekonomi yaitu dimana wisatawan bertransaksi dan menghasilkan benefit bagi penduduk lokal serta (3) *psychographical* sebagai dasar pertimbangan mengapa wisatawan memilih destinasi wisata tertentu sebagai tempat menghabiskan waktu.

Perkembangan *tourism destination* sebagai sajian produk yang menjanjikan peluang kesejahteraan di suatu negara tidak lagi sekedar sebagai batas wilayah geografik, melainkan pengkombinasian aneka

produk, pelayanan dan sumber daya dan pengelolaan informasi yang berfungsi menggerakkan wisatawan menuju wilayah destinasi tertentu (Leiper, 1995). Keller (2000), menyimpulkan bahwa destinasi wisata dan produk pelayanan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Daya Tarik Wisata

Cooper et all (1995), mengatakan bahwa terdapat empat komponen yang harus dimiliki oleh sebuah obyek wisata, yaitu

- a. *Atraksi (attraction)*, yaitu segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke suatu tempat tujuan wisata. Atraksi juga merupakan sesuatu yang dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat dilihat, dan dinikmati oleh wisatawan yang meliputi tari-tarian, nyanyian kesenian rakyat tradisional, upacara adat, dan lain lain.
- b. *Aksesibilitas (accessibilities)*, meliputi moda transportasi untuk mencapai tempat wisata serta prasarana meliputi jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara. Prasarana ini berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat yang lain. Keberadaan prasarana transportasi akan mempengaruhi laju tingkat transportasi itu sendiri.
- c. *Amenitas (amenities)*, atau fasilitas wisata merupakan hal-hal penunjang terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan wisata.

- d. *Ancillary Services*, yaitu adanya organisasi kepariwisataan untuk pelayanan wisata seperti *destination marketing management organization*.

J. P. Chaplin (2008), mengatakan daya tarik adalah sesuatu yang mempunyai beberapa kualitas yang mampu mendatangkan tingkah laku yang menyebabkan *adient behavior* yaitu kecenderungan untuk mendekati sumber. Sejalan dengan definisi tersebut Yoeti (2002) menyatakan bahwa daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti : daya tarik alam, daya tarik budaya, daya tarik sosial dan daya tarik arsitektur.

3. Pariwisata Alternatif

Pariwisata alternatif merupakan bentuk dari kepariwisataan yang konsisten dengan alam, sosial, dan masyarakat serta yang mengijinkan interaksi dan berbagai pengalaman antara wisatawan dengan masyarakat serta yang mengijinkan interaksi dan berbagi pengalaman antara wisatawan dengan masyarakat lokal (Valene, 1992). Wisata alternatif juga sering diartikan sebagai bentuk pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil yang memperhatikan aspek kepedulian lingkungan baik lingkungan abiotik, biotik dan sosial-budaya masyarakat setempat. Pariwisata alternatif juga muncul akibat kejenuhan terhadap pariwisata

massal yang menimbulkan banyak kerusakan lingkungan sosial, serta tidak memperhatikan keberlanjutan dari objek wisata itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata alternatif merupakan kecenderungan baru dari bentuk pariwisata yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan, kualitas lingkungan, dan kualitas sosial budaya masyarakat setempat serta kualitas lingkungan, dan kualitas pengalaman yang dikembangkan selama ini, yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat setempat serta kualitas hidup masyarakat lokal (*host*).

4. Ekonomi Pariwisata

Spillane (1987) menyebutkan bahwa aspek ekonomi pariwisata paling tidak terkait dengan lima hal, yaitu :

a. Lokasi industri pariwisata mempunyai beberapa pengaruh dan akibat terkait dengan keadaan ekonomi suatu kawasan. Dari berbagai pengaruh dan akibat tersebut, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam kaitannya dengan lokasi sebuah industri pariwisata, sebagai berikut :

- 1) Pengaruh masyarakat daerah dengan dibangunnya beberapa fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, dan lainnya berpengaruh kepada masyarakat setempat, seperti : penyerapan tenaga kerja, promosi budaya daerah masyarakat, pemberdayaan hasil alam masyarakat daerah, pemberdayaan hasil alam masyarakat daerah dan pengembangan infrastruktur pendukung di daerah.

- 2) Akibat ganda pariwisata dengan besarnya pertumbuhan pariwisata juga berperan ganda dalam terciptanya kesempatan kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga menekan angka pengangguran. misalnya: di saat pariwisata tumbuh, maka industri pariwisata juga membutuhkan orang yang handal juga dalam bidang tersebut seperti pemandu wisata, *driver* pariwisata dan lainnya.
- 3) Berbagai masalah dalam pariwisata, antara lain :
- a) Berkembangnya pola hidup yang konsumtif di kalangan masyarakat daerah wisata;
 - b) Berkurangnya lahan pertanian, karena perluasan kawasan wisata;
 - c) Berubahnya gaya atau pola hidup sehari-hari di daerah wisata;
 - d) Terganggunya kelestarian lingkungan;
 - e) Tenaga kerja pribumi hanya berada pada level yang bawah, seperti *gardener, bellboy, cleaning service*, dan lainnya.
 - f) Budaya dikomersilkan melalui munculnya berbagai kesenian yang awalnya hanya dipentaskan untuk kepentingan kebudayaan, kemudian demi kepentingan wisatawan dijadikan suatu yang bersifat komersial, seperti Pura umat Hindu di Bali.
 - g) Bahan makanan yang tidak sesuai standar membuat pihak hotel dan restoran harus mengimpor untuk bahan bakunya dari negara asal. Hal ini membuat tidak diberdayakannya hasil bumi

masyarakat setempat. Contoh: beberapa jenis sayuran dan minuman.

h) Munculnya sex industri yang membuat masyarakat setempat terpengaruh terhadap budaya luar, sehingga melanggar dari norma yang berlaku di daerah tersebut, seperti banyaknya pub dan diskotek serta tempat karaoke yang beralih fungsi.

b. Sifat Khusus Industri Pariwisata, Pariwisata Menurut Spillane (1987), pariwisata adalah keseluruhan rangkaian dan usaha menjual barang dan jasa yang diperlukan wisatawan, selama melakukan perjalanan wisata sampai kembali ke tempat asalnya. Industri pariwisata dalam pengertian yang lain ialah industri yang berupa seluruh kegiatan pariwisata yang utuh. Batasan pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pariwisata sebagai industri di sini dapat dipahami dengan memberikan gambaran mengenai komponen-komponen kepariwisataan dalam industri tersebut yang saling terkait satu dengan yang lain. Jadi komponen-komponen kepariwisataan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian jasa yang kait mengait yang dihasilkan industri-industri Lain, misalnya: industri kerajinan, perhotelan, angkutan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Spillane (1987) mengatakan industri pariwisata mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sebagai berikut: (1) produk wisata tidak dapat dipindahkan; (2) produksi dan konsumsi terjadi pada saat yang sama; (3) produk wisata memiliki beragam bentuk; (4) pembeli tidak dapat

mencicipi bahkan tidak dapat menguji produk; (5) produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko besar.

Sedangkan menurut Kotler (1993), secara keseluruhan produk pariwisata pada umumnya telah diakui sebagai produk jasa dengan ciri-ciri khusus, sebagai berikut.:

- 1) *Intangibility* (tidak berwujud), dimana jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa diidentifikasi oleh ke lima indera manusia, seperti: dilihat, dirasa, diraba, didengar, atau dicium sebelum terjadi proses transaksi pembelian.
- 2) *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan), dimana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, apakah sumber itu merupakan orang maupun mesin, di samping itu apakah sumber itu hadir atau tidak, produk fisik yang berwujud tetap ada.
- 3) *Variability* (berubah-ubah), dimana jasa dapat mudah berubah-ubah karena jasa ini tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan dimana disajikan.
- 4) *Perishability* (daya tahan), dimana jasa tidak dapat disimpan dan tidak memiliki daya tahanyang lama karena sifatnya tergantung dari fluktuasi permintaan.

c. Aspek Penawaran Pariwisata, terdiri dari :

- 1) Proses produksi industri pariwisata, yaitu penciptaan kemamfaatan tenaga kerja yang bersifat langsung dan sangat menonjol adalah di bidang perhotelan, suatu industri jasa yang bersifat padat karya

(relatif terhadap modal yang ditanam). Dan bidang-bidang lain, seperti biro perjalanan wisata, pramuwisata, pusat-pusat rekreasi dan kantor-kantor pariwisata pemerintah. Kemajuan pengembangan pariwisata sebagai industri, ditunjang oleh bermacam-macam usaha, di antaranya sebagai berikut :

- a) Promosi untuk memperkenalkan objek wisata
- b) Transportasi yang lancar
- c) Kemudahan keimigrasian birokrasi
- d) Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
- e) Pemandu wisata yang cakap
- f) Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan relatif harga yang wajar.
- g) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
- h) Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.

2) Pentingnya tenaga kerja serta penyediaannya dimana tenaga kerja dilengkapi dengan tenaga kerja pada industri penunjang pariwisata, seperti perusahaan kerajinan, dekorasi hotel, toko souvenir dan sebagainya. Perkembangan pariwisata sangat penting berpengaruh positif pada perluasan kesempatan kerja.

3) Infrastruktur/ prasarana merupakan motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan yang meningkatkan permintaan terhadap sarana/ prasarana seperti prasarana perhubungan, sarana akomodasi dan jasa-jasa, persediaan-persediaan lain

yaitu sarana-sarana hotel, bar dan restoran, perjalanan wisata, agen perjalanan, dan lain-lain.

4) Faktor-faktor penentu dari perhubungan pariwisata adalah berbagai fasilitas (kredit bank dan sebagainya) yang diberikan oleh pemerintah seperti kemudahan untuk pembelian tiket, menyewa hotel dan berwisata.

d. Aspek permintaan industri pariwisata yang setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor yang secara signifikan mempengaruhi permintaan (*demand*) industri pariwisata sebagaimana dikutip dari Spillane (1987), yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Sosio-Ekonomi dan Pariwisata, terdiri dari beberapa komponen, yaitu Undang-Undang sosial, pendapatan yang meningkat, pendidikan dan perasaan ingin tahu, Urbanisasi dan kebutuhan untuk menghindari kebisingan kota, hasrat untuk meniru;

2) Faktor administrasi dan pariwisata, berupa kemudahan untuk melakukan perjalanan lintas batas negara memacu masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata;

3) Faktor-faktor teknis : kemajuan dunia angkutan seperti angkutan kereta api, angkutan mobil dan bus, angkutan sungai/laut serta angkutan udara.

e. Pasar industri pariwisata, sebagaimana dikemukakan Spillane (1987), bahwa pasar industri pariwisata di Indonesia setidaknya bisa

diidentifikasi dengan 3 (tiga) faktor utama, yaitu susunan pasar menurut penghasilan konsumen, pemasaran, dan fasilitas angkutan, pelayanan, dan pola perjalanan.

1) Penghasilan konsumen

Spillane (1987) menyatakan bahwa wisatawan yang datang ke Indonesia bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. Wisatawan internasional pengeluaran tinggi wisatawan internasional pengeluaran rendah wisatawan domestik. Menurutnya, turis-turis domestik dan kelas rendah menggunakan fasilitas-fasilitas yang ditujukan untuk rakyat. Mereka bepergian memakai angkutan, penginapan, dan makan di restoran-restoran yang lebih murah dibandingkan imbalan mereka yang jauh keuntungan terhadap neraca pembayaran dan minimum. Namun kalau diukur pengganti kelas rendah mungkin sekali mempunyai suatu akibat kuat daripada kelas tinggi. Oleh karenanya, menurut dia ekonomi kelas rendah dan domestik mungkin sekali lebih luas dan dirasakan langsung

2) Pemasaran

Menurut H.F Stanley, dalam Spillane (1987) *marketing mix* (paduan pemasaran), sebuah strategi operasi untuk mempertemukan penawaran dan permintaan, memiliki unsur-unsur, yaitu *product mix*, *distribution mix*, *communication mix*, *service mix*

3) Fasilitas

Fasilitas merupakan hal penting untuk keberhasilan pengembangan pariwisata. Fasilitas itu melingkupi fasilitas angkutan, akomodasi, pelayanan sosial pelayanan sosial dan pelayanan umum.

5. Peran Pemerintah

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapuskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya. Disamping itu pengembangan pariwisata juga diharapkan akan mampu untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan.

Kehadiran pariwisata akan berdampak kepada manfaat sosial-ekonomi yang lebih banyak dinikmati oleh pelaku bisnis pariwisata, sehingga diperlukan kehadiran pemerintah untuk menyertakan komponen masyarakat agar ikut serta mendapatkan bagian dari proses bisnis

pariwisata. Pariwisata secara garis besar memanfaatkan daya tarik wisata seperti pantai, pegunungan, keindahan alam dan hutan raya yang dianggap sebagai aset pariwisata termasuk budaya masyarakat lokal, yang sesungguhnya juga merupakan milik dari masyarakat, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya ekonomi yang memadai (Ashley et al, 2001). Pariwisata memerlukan keterlibatan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting menuju *sustainable tourism* (Sutawa, 2010) maka kehadiran kebijakan pemerintah menjadi sangat strategis untuk dapat mewujudkan dinamika bisnis pariwisata berkelanjutan (UN, 1999).

a) Peran Pemerintah Dalam Pariwisata

Soekanto (1987), mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Dimana peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia, “Peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Menurut Siagian (1992) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani yaitu sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemerintah memiliki lima fungsi utama yaitu : (1) sebagai penyedia layanan, yang berkaitan dengan penyediaan 36 pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya; (2) fungsi pengaturan, yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan; (3) fungsi pembangunan, yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi; (4) fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka; (5) fungsi koordinasi, berkaitan dengan perencanaan, pengkoordinasian, investasi dan tata guna lahan (Davey, 1998).

Blakely dalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator. Adapun jabaran tentang peran pemerintah secara lebih operasional adalah sebagai berikut :

- 1) Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat serta mampu untuk mensejahterakan perekonomian sekitar.
- 2) Koordinator, Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- 3) Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses

pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.

- 4) Stimulator, pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

Pitana dan Gayatri (2005), mengemukakan pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya, sebagai:

- 1) Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- 2) Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh pemerintah.

Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.

- 3) Dinamisator, dalam pilar *good governance*, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Menurut Yoeti (2001) ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penyebaran lalu lintas pariwisata keluar dari pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- 2) Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata dapat menjadi katalisator pembangunan dan meningkatkan PAD, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- 3) Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan

organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

Ketiga hal tersebut mempunyai implikasi penting bagi pembangunan fisik. Selain fisik, koordinasi dan manajemen organisasi pariwisata sangat diperlukan demi terwujudnya pariwisata yang profesional dan bisa memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Terkadang ada destinasi pariwisata di suatu daerah yang sangat potensial, tetapi organisasi pariwisata tidak mampu mengelola dengan baik sehingga destinasi pariwisata tersebut akan kurang diminati oleh wisatawan. Disinilah organisasi pariwisata daerah dapat memainkan peran penting, terutama melakukan koordinasi terhadap semua potensi dan sumber-sumber daya yang terdapat di daerah itu, sehingga harapan terhadap pariwisata sebagai katalisator bagi pembangunan daerah dapat menjadi kenyataan dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah itu.

Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa terdapat pendelegasian dan pengaturan sektor-sektor tertentu pada satuan tingkat daerah. Begitu pula dengan bidang pariwisata, organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pariwisata adalah dinas pariwisata. Secara garis besar peran dinas pariwisata adalah melakukan tugas pemerintah dengan pengelola pariwisata dan kebudayaan yang ada di suatu daerah. Secara spesifik adalah memberdayakan masyarakat untuk bersama mengembangkan pariwisata.

b) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Peran kebijakan pemerintah diperlukan kehadirannya dalam rangka menyelesaikan masalah *market failure* yang terjadi di sektor industri pariwisata (Janoszka, 2013). Pemerintah dapat berperan dalam meminimalisir adanya hambatan dalam proses pembentukan inovasi dan kreativitas yang mendorong kinerja industri pariwisata menjadi berdaya saing. Pivcevic dan Petric (2011) menyatakan telah terjadi *low absorptive capacity* pada proses pengembangan inovasi, yaitu terkondisikan pada faktor yang menghambat inovasi berkembang tumbuh yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial budaya yang tidak memberikan dorongan pada inovasi. Adanya sikap masyarakat yang memandang rendah aktivitas inovasi, terabaikannya inovasi sebagai faktor penentu dalam membangun pelayanan jasa industri wisata, tingginya *transaction cost* yang menyebabkan pelemahan daya saing (Pompl dan Buer, 2006).

Lebih lanjut Moelyono (2010), menyatakan dalam menciptakan kreativitas sebagai elemen terpenting dari pengembangan industri pariwisata sangat ditentukan bagaimana proses pendidikan dan kebijakan yang mampu melahirkan individu-individu untuk menghasilkan beragam inovasi. Untuk menciptakan hal ini, sangat bergantung dengan kolaborasi dari tiga aktor utama yaitu cendekiawan (*intellectuals*), bisnis (*business*), dan pemerintah (*government*) sebagai sistem Triple Helix. Ketiga aktor ini

merupakan penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Triple Helix merupakan faktor-faktor penting untuk membentuk fondasi dan pilar industri kreatif yang kokoh dan berdaya saing.

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya, adalah (1) menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), (2) memperluas berbagai bentuk fasilitas, (3) kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak swasta, (4) pengaturan dan promosi umum, (5) sarana transportasi, (6) keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata.

6. Partisipasi Masyarakat

Pembangunan dewasa ini merupakan perubahan yang direncanakan dalam suatu masyarakat yang berpegang pada model pembangunan dari bawah. Menurut David Pitt dalam Geriya (1995) model pembangunan dari bawah mengandung prinsip-prinsip :

- a. Potensi masyarakat adalah model awal yang dapat dilanjutkan, sehingga proses pembangunan mempunyai dasar yang mantap.
- b. Pembangunan mempunyai jati diri yang bertumpu pada kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dengan bekal jati diri yang jelas dan mantap masyarakat menjadi stabil dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan.

- c. Partisipasi aktif masyarakat dapat digerakkan dan dikembangkan karena pembangunan sesuai dengan kemauan, kemampuan dan kesepakatan masyarakat. Masyarakat terlatih untuk mandiri dan bertanggung jawab.
- d. Masyarakat cukup dihargai kemartabatannya sehingga status mereka bukan saja sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek pembangunan.
- e. Pembangunan memiliki mekanisme kesinambungan karena sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.
- f. Pembangunan bersifat efektif dan sekaligus ekonomis, karena masyarakat akan terus terlibat aktif dalam proses pemeliharaan.

Konsep pembangunan yang berdasar pada masyarakat didapatkan hal-hal positif sebagai berikut: (1) masyarakat diperlakukan sebagai obyek, (2) terjadi kecocokan aspirasi dan budaya yang terbina melalui dialog, (3) berkembang partisipasi serba rela dalam suasana integratif.

Conyers (1991) menyampaikan terdapat tiga alasan utama pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih

mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis dalam pengembangan industri pariwisata. Bopp et all (2000), mendefinisikan partisipasi komunitas pada industri pariwisata sebagai kualitas dari komunikasi antar individu yang memberikan ruang kepada semua pihak termasuk wisatawan untuk hidup bersama secara harmonis. Menurut Syahyuti (2005), partisipasi adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap kesalinghubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan. Oleh sebab itu pembangunan yang partisipatif merupakan pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan kehidupan mereka. Secara harfiah, partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertanya seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Sedangkan partisipasi warga adalah suatu bentuk keikutsertaan langsung warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Suhirman, 2004).

Berdasarkan berbagai pengertian partisipasi tersebut, paling tidak ada dua pengertian partisipasi, (1) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai dukungan rakyat dengan ukuran kemauan masyarakat untuk ikut menanggung biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga, (2) partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari pengertian kedua ini tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun serta ada tidaknya kemauan rakyat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu secara mandiri. Partisipasi juga dapat berarti mendorong proses belajar bersama, berkomunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan di tingkat politik formal dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian pengertian partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan mulai dari menentukan tujuan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dengan dilandasi oleh kesadaran akan tujuan itu.

Menurut Arnstein (1969) terdapat delapan tingkatan yang menggambarkan tingkatan partisipasi, dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

No	Tangga/Tingkat Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkat Pembagian Kekuasaan
1	Manipulasi (<i>Manipulation</i>)	Permainan Oleh Pemerintah	Tidak ada partisipasi
2	Terapi (<i>Therapy</i>)	Sekedar masyarakat agar tidak marah/ sosialisasi	
3	Pemberitahuan (<i>Informing</i>)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	<i>Tokenism /</i> sekedar justifikasi agar mengiyakan
4	Konsultasi (<i>Consultation</i>)	Masyarakat didengar, tetapi tidak selalu sarannya digunakan	
5	Penentraman (<i>Placation</i>)	Saran Masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7	Pendelegasian Kekuasaan (<i>Delegated Power</i>)	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	
8	Kontrol Masyarakat (<i>Citizen Control</i>)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Sumber: Arnstein (1969)

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan. Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan

masyarakat (*citizen participation is citizen power*). Partisipasi masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan.

B. Pariwisata Bahari

Wisata bahari adalah bentuk wisata yang menggunakan atau memanfaatkan potensi lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Konsep wisata bahari didasarkan pada view, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat sebagai kekuatan dasar yang dimilikinya (Sero, 2010: 19). Menurut Fandeli (1996: 50), wisata bahari adalah wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari bentang laut (*seascape*) maupun bentang darat pantai (*coastal landscape*).

Dalam hubungan dengan aktivitas wisata alam pantai dan bahari maka secara umum kegiatan wisata di objek wisata alam dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu 1) wisata perairan atau wisata bahari; dan 2) wisata daratan. Aktivitas bentang laut, yaitu berenang, memancing, bersampan yang meliputi berdayung, atau berlayar, menyelam yang meliputi *diving* dan *snorkeling*, berselancar serta berperahu parasut (*parasailing*). Aktivitas bentang darat, yaitu rekreasi berupa olahraga susur pantai, bersepeda, panjat tebing pada dinding terjal pantai dan menelusuri gua pantai. Selain itu dapat pula dilakukan aktivitas

bermain layang-layang, berkemah, berjemur, berjalan-jalan melihat pemandangan, atau berkuda.

Menurut Fandeli (1995: 89), wisata perairan atau wisata bahari (didalamnya termasuk wisata pantai) adalah kegiatan wisata seperti berenang, memancing (*fishing*), menyelam (*diving* dan *snorkeling*), berlayar (*sailing*), berselancar (*surfing*), ski laut (*skiing*), berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, *canoeing*, dan lain-lain. Adapun kegiatan menikmati keindahan dan keanekaragaman hayati potensi laut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) pada perairan dangkal dengan menggunakan perahu yang lantainya atau bagian dinding bawah perahu itu terdiri atas gelas kaca tembus pandang; dan (2) menggunakan perlengkapan menyelam khususnya untuk tempat-tempat yang dalam dan tidak mungkin dapat dilihat dengan perahu gelas kaca tembus pandang.

Dalam kegiatan wisata pantai, terdapat berbagai kriteria standar yang harus dipenuhi. Kriteria standar ini terdiri atas kriteria fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Aktivitas kegiatan wisata bawah laut seperti *diving* dan *snorkeling* harus ditunjang dengan parameter-parameter dari pariwisata bawah laut, antara lain sebagai berikut (Sero, 2010: 21-22). Kecerahan perairan yaitu perairan yang cerah merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam kegiatan ini, dimana semakin cerah suatu perairan semakin terlihat keindahan taman laut yang dinikmati oleh para wisatawan.

Persentase tutupan terumbu karang merupakan syarat utama dalam pariwisata bahari, karena merupakan unsur utama dari nilai estetika taman laut yang akan dinikmati oleh para wisatawan. Jenis terumbu karang, semakin beragam jenis terumbu karang semakin banyak keindahan alam bawah laut yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Jenis ikan karang, daerah yang memiliki lebih dari 50 spesies dikategorikan sebagai daerah dengan jenis ikan karang sangat beragam.

Kecepatan arus berkaitan dengan keamanan wisatawan dalam melaksanakan aktivitasnya. Dengan demikian kecepatan arus yang relatif lemah merupakan syarat ideal untuk kegiatan penyelaman. Kedalaman perairan, kedalaman perairan ditentukan oleh penetrasi sinar matahari kedalam perairan. Diasumsikan pertumbuhan karang laut umumnya sampai kedalaman 18 meter. Secara umum ragam daya dukung wisata bahari meliputi daya dukung ekologis, fisik, sosial, rekreasi. Penyediaan fasilitas secara umum pada objek wisata alam menurut Fandeli (1996: 50) terdiri atas. Fasilitas, meliputi persyaratan lokal dan kemampuan pencapaian, peruntukkan dan tata guna tanah (land use), jalan umum, terminal dan parkir kendaraan, akomodasi, tempat rekreasi dan lain-lain. Prasarana, meliputi system dan jaringan air bersih, drainase air hujan, pembuangan limbah dan air kotor, suplai dan distribusi daya listrik, sistem dan jaringan komunikasi serta fasilitas transportasi jalan, terminal, jembatan, drainase, penerangan, dan sebagainya.

Dalam arti luas pariwisata adalah kegiatan rekreasi di luar domisili untuk melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain (Damanik dan Weber, 2006). Menurut Mathieson dan Wall (1982) Pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan sementara seseorang ke tempat lain dari tempat tinggal dan tempat kerjanya serta melakukan berbagai kegiatan selama berada ditempat tujuan dan memperoleh kemudahan dalam penyediaan berbagai kebutuhan yang diperlukan. Wisata merupakan suatu bentuk pemanfaatan sumberdaya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia. Kegiatan manusia untuk kepentingan wisata dikenal juga dengan pariwisata (Yulianda, 2007). Pengembangan kawasan wisata merupakan alternatif yang diharapkan mampu mendorong potensi ekonomi dan juga upaya pelestarian, yang dilakukan dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hayati secara terpadu, yang pada akhirnya dikembangkan suatu model pengelolaan kawasan wisata yang berorientasi pelestarian lingkungan (Ramly, 2007). Dalam beberapa dekade terakhir pengembangan kawasan wisata pantai untuk wisata terus meningkat. WTO (2004) menyatakan bahwa hampir tiga perempat destinasi wisata di dunia adalah daerah pesisir pantai. Hal ini mengindikasikan adanya peluang dalam pengembangan kawasan wisata pantai agar dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan di daerah.

The Rise of Coastal and Marine Tourism merupakan salah satu studi yang terkait dengan konsep wisata marin buah pena Marc L. Miller

(1993). Studi tersebut diselenggarakan dengan menerapkan perspektif sosiologi dalam menemukenali dan memahami interaksi simbolik yang menjadi penyebab terbentuknya solidaritas sosial, yang diasumsikan dapat membentuk serta mengembangkan wisata marin. Asumsi tersebut terbentuk melalui pemahaman bahwa selama kerusakan lingkungan, salah satu penyebabnya ialah keberadaan sektor pariwisata yang sangat berkembang, tidak hanya didaratan dimana terdapat lingkungan alam dan kehidupan manusia melainkan juga dilautan dimana kedua hal tersebut juga berada. Hasil studi Miller kemudian menunjukkan, bahwa; *“the resolution of tourism problems in the coastal zone will require the scientific study of environmental and social conditions, policy analyses, planning, and public education”*, yang kemudian dikemas dalam konteks ekoturisme (*ecotourism*).

Penelitian yang diselenggarakan, memiliki kesamaan dengan studi Miller, dimana pandangan bahwa pariwisata sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan alam, yang dalam hal ini merujuk pada lingkungan alam laut, adalah benar, sebab tidak berarti bahwa para wisatawan dengan sengaja merusaknya melainkan melalui sampah, selain juga mungkin terdapat ketidaktahuan para pemandu wisata dalam menempatkan jangkar, atau lainnya, yang dengan demikian; diasumsikan bahwa penyelesaian masalah berkaitan dengan wisata bahari dalam konteks wisata marin, memerlukan kesiapan dari berbagai pihak yaitu pelaku dari bisnis pariwisata, masyarakat, dan pemerintah, yang kesemuanya adalah

bagian dari potensi untuk membentuk dan/atau mengembangkan wisata bahari/ marin itu sendiri. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilakukan setelah stakeholder yang dimaksud memahami perbedaan mendasar antara konsepsi wisata bahari (*marine*) dan wisata bahari/ maritim.

Wisata bahari disatu sisi, merujuk pada ragam aktivitas atau tindakan wisata, yang terdiri atas tiga kategori, yaitu; “*cruising, private maritime tourism - yachting, and coastal leisure shipping*, yang mana ketiganya seharusnya dianalisa dengan menekankan pada “*the advantages and disadvantages which distinguish each of these activities and their prospects of evolution*” (Diakomihalis, 2007). Wisata bahari/ maritim sebagaimana studi Diakomihalis, tidak menampakkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan alam laut, namun sangat dapat merusak kebudayaan masyarakat yang berada dipesisir laut, sebab dilakukannya tindakan wisata oleh para wisatawan yang diasumsikan tidak menjadi bagian dari kebiasaan (adat) dari masyarakat yang dimaksud. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam akan kebudayaan dari suatu masyarakat pesisir menjadi sangat penting.

C. Kawasan Pariwisata

1. Pengertian Kawasan Wisata

Kawasan wisata dipandang sebagai persamaan dengan konsep pembangunan daerah yang menganggap ruang sebagai aset relasional. Konsep kawasan berafiliasi dengan lingkup ekonomi

wilayah dan dalam perspektif bahwa wilayah merupakan subjek kekuasaan dalam proses pembangunan wilayah. Dalam perspektif ini, Nunes (2020) mengemukakan bahwa “kawasan merupakan kumpulan dari berbagai dimensi ruang: ruang fisik (skala geografis), ruang interaksi (pemain, jaringan dan dinamika interaksi) dan ruang kelembagaan politik”.

Istilah lain tentang kawasan wisata juga dimaknai sebagai "teritorial", yaitu hasil dari saling ketergantungan yang kompleks antara ukuran pasar, dinamika interaksi dan kerangka kelembagaan-politik yang kurang lebih menguntungkan untuk pencapaian ekonomi dan sosial (Camagni, 2008). Dalam istilah ini, kawasan wisata merupakan proses yang berusaha untuk secara bersamaan memaksimalkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (produksi, lapangan kerja, ekspor, investasi) dan keberlanjutan (sumber daya, keluarga, perilaku, mobilitas).

Dalam konteks di Indonesia, kawasan wisata didefinisikan dalam dua aspek, sebagai berikut.

- a). Suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- b). Suatu wilayah kawasan wisata yang memiliki keunikan dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik/ keunikan fisik lingkungan

alam kawasan wisata maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan), yang dikelola dan dikemas secara alami dan menarik dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik dan terencana. Sehingga daya tarik kawasan tersebut mampu menggerakkan kunjungan wisatawan ke kawasan wisata tersebut, serta menumbuhkan aktifitas ekonomi pariwisata yang meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat (Bappeda, 2015).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan wisata merupakan aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi kawasan dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan. Dalam pengertian ini, sebenarnya menyiratkan pula bahwa tujuan dari suatu wilayah semakin terkait dengan dinamika daya saing pariwisata.

2. Kriteria Kawasan Wisata

Dalam uraian sebelumnya telah disajikan kerangka konseptual bahwa potensi kawasan wisata berkaitan erat dengan daya saing pariwisata. Oleh karena itu, penting untuk memahami tentang potensi khas baik yang terkait dengan aset alam ataupun budaya. Beberapa

ahli memberikan kriteria-kriteria sumber daya yang layak sebagai kawasan wisata.

Pertama, Nunes & Sousa (2018) mengemukakan bahwa kawasan wisata dapat dicermati berdasarkan kesempurnaan sumber daya yang dimiliki (*Perfect resources*). Sumber daya yang sempurna tersebut, antara lain:

(a) globally scarcity, (b) locally abundancy, (c) local control of the resource, (d) territorial embeddedness, (e) multiplier effects, (f) use requires preservation (sustainability), (g) global demand (viability).

Menurut Nunes & Sousa, sebuah kawasan wisata tidak harus ditunjukkan melalui keberadaan ketujuh kriteria sumber daya di atas secara bersamaan. Tetapi, setidaknya memuat di antara beberapa kriteria yang dihasilkan dari konstruksi politik, ekonomi dan sosial. Aspek penting lainnya yakni adanya partisipasi masyarakat lokal sebagai mekanisme kontrol sumber daya. Terakhir, dinamika kelangsungan hidup dan pelestarian ekonomi.

Kedua, Ritchie & Crouch (2003) menerjemahkan kawasan wisata sebagai wilayah yang memiliki keunggulan baik secara kompetitif maupun komparatif. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Tujuannya ialah agar wilayah tersebut memiliki *value* khas yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Hal ini selaras konsepsi sebagai berikut.

“Strategic management is all about gaining and maintaining competitive advantage. This term can be defined as any activity a firm does especially well compared to activities done by rival firms, or any resource a firm possesses that rival firms desire” (David & David, 2017).

Sementara, keunggulan komparatif ialah kemampuan suatu wilayah dalam membandingkan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah lain (Bolli & Renold, 2017). Prasyarat komprehensif tentang daya saing destinasi dimulai dari basis sumber daya inti (seperti iklim, budaya dan sejarah, hiburan dan faktor pendukung) serta sumber daya seperti infrastruktur, aksesibilitas, perhotelan.

Ketiga, pada konteks pariwisata di Indonesia juga menyajikan kriteria-kriteria khusus yang menjadikan suatu wilayah dapat dinyatakan sebagai kawasan wisata. Menurut Bappeda (2015) berbagai kriteria dan faktor pendukung tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a). Potensi Produk Obyek dan Daya Tarik Wisata yang Unik dan Khas. Memiliki potensi produk/ daya tarik yang unik dan khas yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik kunjungan wisatawan (sumber daya wisata alam, budaya). Potensi obyek dan daya tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata. Potensi kawasan wisata tersebut dapat berupa:

- (1). Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur yang unik dan khas, dsbnya).
 - (2). Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan keseharian masyarakat yang unik dan khas, adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional, dsbnya).
- b). Tingkat Penerimaan dan Komitmen yang Kuat dari Masyarakat Setempat. Tingkat penerimaan dan komitmen masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan; yaitu adanya sikap keterbukaan dan penerimaan masyarakat setempat terhadap kegiatan pariwisata sebagai bentuk kegiatan yang akan menciptakan interaksi antara masyarakat lokal (sebagai tuan rumah) dengan wisatawan (sebagai tamu) untuk dapat saling berinteraksi, menghargai. Sehingga, pada gilirannya memberikan manfaat yang saling menguntungkan, khususnya bagi masyarakat lokal yakni penghargaan dan pelestarian budaya setempat serta kesejahteraan ekonomi.
- c). Potensi Sumber Daya Manusia Lokal yang Mendukung. Memiliki dukungan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai mendukung pengelolaan kawasan wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan kawasan wisata dimaksudkan untuk

memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di kawasan tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat.

d). **Peluang Akses terhadap Pasar Wisatawan.** Potensi dasar yang dimiliki oleh suatu kawasan untuk menjadi kawasan wisata selanjutnya perlu didukung dengan faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran kunci, karena suatu kawasan yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata tidak ada artinya manakala tidak memiliki akses untuk berinteraksi dengan pasar/ wisatawan. Oleh karena itu kesiapan kawasan wisata harus diimbangi dengan kemampuan untuk membangun jejaring pasar dengan para pelaku industri pariwisata, dengan berbagai bentuk kerjasama dan pengembangan media promosi sehingga potensi kawasan tersebut muncul dalam peta produk dan pemaketan wisata di daerah, regional, nasional maupun internasional. Sedemikian sehingga dapat dijaring peluang kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut.

e). **Ketersediaan Area/ Ruang untuk Pengembangan Fasilitas Pendukung Wisata.** Memiliki alokasi ruang/ area untuk

pengembangan fasilitas pendukung wisata kawasan, seperti: akomodasi, area pelayanan umum, area kesenian dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena aktifitas wisata kawasan akan dapat berjalan baik dan menarik apabila didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang yang memungkinkan wisatawan dapat tinggal, berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan belajar mengenai kebudayaan setempat, kearifan lokal dan lain sebagainya.

Berdasarkan paparan kriteria kawasan wisata di atas, maka dapat dipahami bahwa sebuah kawasan wisata terwujud atas keterpaduan beberapa elemen. Elemen tersebut ialah daya tarik sumber daya, konektivitas (melalui pembangunan jaringan dan interaksi yang beragam), kohesi territorial, dan akses (materi, kelembagaan dan keuangan).

Daya tarik tanpa konektivitas membawa sebuah kawasan ke situasi ekonomi, sosial, dan politik yang terkunci. Sementara tanpa akses membawa wilayah ke ketidakseimbangan sosial. Di sisi lain, konektivitas tanpa daya tarik, dan akses tanpa kohesi menjadikan manusia hanya sebagai konsumen virtual tanpa partisipasi pada fungsi produksi territorial.

3. Tipologi Kawasan Wisata

Tipologi kawasan atau corak kawasan wisata dapat ditelusuri berdasarkan karakteristik sumber daya dan keunikan yang dimiliki. Dalam hal ini, Bappeda (2015) mengelompokkan kawasan wisata dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a). Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagai daya tarik wisata utama, yaitu kawasan dengan keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat Kawasan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
- b). Kawasan wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah kawasan dengan keunikan lokasi yang berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga kawasan tersebut memiliki potensi keindahan *view* dan lansekap untuk menarik kunjungan wisatawan.
- c). Kawasan wisata berbasis perpaduan keunikan sumber daya budaya dan alam sebagai daya tarik utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan daya tarik yang merupakan perpaduan yang kuat antara keunikan sumber daya wisata budaya (adat tradisi dan pola kehidupan masyarakat) dan

sumber daya wisata alam (keindahan bentang alam/ lanskap).

- d). Kawasan wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata utama, yaitu wilayah kawasan yang memiliki keunikan dan daya tarik sebagai tujuan wisata melalui keunikan aktifitas ekonomi kreatif yang tumbuh dan berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal berupa kerajinan, maupun aktifitas kesenian yang khas.

4. Prinsip Pengembangan Kawasan Wisata

Kepentingan sosio-ekonomi dalam pariwisata ditunjukkan oleh tingginya jumlah kedatangan internasional yang terdaftar di seluruh dunia. Akhirnya, pariwisata dapat menawarkan peluang untuk pengembangan daerah berdasarkan sumber daya teritorial. Pada saat yang sama, dampak pariwisata pada pemanfaatan sumber daya dan pengaturan sistem ekonomi dapat memberikan kontribusi negatif terhadap keberlanjutan suatu destinasi.

Pengembangan kawasan wisata sebagai suatu aset kepariwisataan dan ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip pengembangan kawasan wisata. Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda (2015) merumuskan lima prinsip fundamental dalam mengembangkan kawasan wisata, antara lain:

- a). Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat kawasan setempat. Pengembangan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan sebagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya dan mata pencaharian kawasan tersebut. Suatu kawasan dalam pengembangannya atraksi wisata harus disesuaikan dengan adat, budaya ataupun tata cara yang berlaku di kawasan tersebut. wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut harus mengikuti tata cara dan adat istiadat yang berlaku di kawasan tersebut.
- b). Pembangunan fisik ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan. Pengembangan pariwisata di suatu kawasan pada hakekatnya tidak merubah apa yang sudah ada di kawasan tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di kawasan dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan atraksi wisata. Pengembangan fisik seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan sanitasi, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada sehingga Kawasan tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati oleh wisatawan.

- c). Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian. Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas kawasan tersebut sehingga dapat mencerminkan kelokalan dan keaslian wilayah setempat. Bahan-bahan/ material yang digunakan untuk bangunan rumah, interior, peralatan makan/minum dan fasilitas lainnya hendaknya memberikan nuansa yang alami dan menggambarkan unsur kelokalan dan keaslian. Bahan-bahan seperti kayu, gerabah, bambu dan sirap serta material alami lainnya hendaknya mendominasi suasana, sehingga menyatu dengan lingkungan alami sekitarnya. Penggunaan bahan-bahan tersebut selain meningkatkan daya tarik kawasan yang bersangkutan juga sesuai dengan konsep dasar lingkungan.
- d). Memberdayakan masyarakat kawasan wisata. Unsur penting dalam pengembangan Kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat kawasan dalam setiap aspek wisata yang ada di Kawasan tersebut. Pengembangan wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung arti bahwa masyarakat kawasan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa

dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di luar aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah rumah penduduk (homestay), penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi lokal seperti andong/dokar, kuda, pertunjukan kesenian, dan lain sebagainya.

- e). Memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta berwawasan lingkungan. Pembangunan suatu kawasan menjadi kawasan wisata harus memperhatikan kapasitas kawasan tersebut, baik kapasitas fisik maupun kesiapan masyarakat. Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*) harus mendasari pengembangan kawasan wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya tarik kawasan tersebut.

D. Rancangan Keruangan

Ditinjau dari geografi, kegiatan pariwisata merupakan interaksi keruangan, baik tingkat lokal, regional, nasional, regional kawasan

tertentu maupun internasional. Adanya interaksi keruangan didasarkan pada (1) proses untuk saling melengkapi antar wilayah (*regional complementary*), (2) adanya kesempatan antara (*interveining opportunity*), dan (3) kemudahan pemindahan secara keruangan (*spatial tranferability*), yang diukur dengan satuan jarak, biaya dan waktu (Abler, et.al, 1971).

Interaksi wilayah akan semakin berkembang karena pada dasarnya wilayah berbeda kondisi fisiografis dan sosiografisnya (*areal differentiation*). Tolok ukur adanya interaksi antar wilayah tersebut yaitu adanya aliran (*flow*), barang, orang, ide serta didukung oleh prasarana dan sarananya antar wilayah. Interaksi wilayah diawali dengan proses penawaran (*supply*) sumberdaya dan permintaan (*demand*). Faktor yang diperhatikan dalam analisis persediaan (*supply*) dalam pengembangan kepariwisataan yaitu obyek wisata sebagai daya tarik dan faktor pendukung obyek pariwisata, yaitu transportasi, akomodasi, infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya.

Adanya obyek yang menarik dan berbeda menimbulkan minat orang untuk mengunjunginya. Adanya dukungan prasarana dan prasarana transportasi mengakibatkan adanya aliran orang ke obyek tujuan tersebut. Kehadiran wisatawan pada daerah tujuan wisata memerlukan fasilitas penunjang akomodasi seperti hotel dan restoran. Untuk dapat memiliki sesuatu kenangan di daerah tujuan wisata bagi wisatawan, maka berkembang kegiatan masyarakat pada daerah tujuan wisata yaitu industri cinderamata. Industri yang kebanyakan dilakukan dalam rumah

tangga ini, memungkinkan adanya kesempatan kerja dan berusaha, utamanya bagi penduduk setempat.

Untuk mengembangkan daerah tujuan wisata dilakukan kegiatan inventarisasi obyek. Hal ini diawali dengan menginventarisasi jenis obyek wisata yaitu wisata alam, flora-fauna, arsitektur, peninggalan sejarah, dan wisata budaya. Dilanjutkan dengan inventarisasi pendukung obyek wisata, seperti akomodasi, transportasi dan infrastruktur serta sebaran keruangannya. Semua informasi obyek digunakan untuk menyusun model kepariwisataan dan skala prioritas obyek yang dikembangkan.

Informasi tentang obyek wisata dilengkapi dengan informasi jaringan transportasi sebagai penghubung antar obyek wisata, antara obyek dengan fasilitas penunjang. Informasi meliputi: jenis dan keadaan sarana transportasi, jarak, biaya, tempat transit (terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan lainnya). Informasi transportasi dilengkapi juga dengan informasi mengenai infrastruktur, seperti jenis dan keadaan jalan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, bandara dan lainnya.

Informasi tentang akomodasi meliputi: berbagai jenis penginapan (hotel, pondok wisata, dll), restoran, tempat rekreasi dan olah raga, tempat minum dan lainnya. Data yang dikumpulkan meliputi: lokasi, jarak, aksesibilitas, jenis, peringkat, dan berbagai fasilitas yang dimilikinya. Informasi akomodasi dilengkapi pula dengan fasilitas pelayanan lainnya,

seperti bank, tempat penukaran uang, kantor pos, telepon, apotik, pusat perbelanjaan, *artshop*, *gallery*, dan lainnya.

Penyajian informasi dalam bentuk peta dan atau matrik sehingga dapat disusun peringkat obyek dan fasilitas penunjangnya. Peringkat tersebut antara lain obyek wisata untuk wisatawan domestik (lokal, regional dan nasional) dan internasional (regional dan internasional), jenis obyek wisata (alam, budaya, minat khusus, dan lainnya) dari peringkat ini akan membantu dalam penyusunan skala prioritas pengembangannya. Prakiraan dampak yang akan ditimbulkan dalam pengembangan pariwisata dapat dimasukkan dalam matrik, sehingga dapat dilakukan mitigasi dampak secara bersamaan dengan perencanaan pengembangannya.

Analisis permintaan dapat dilakukan melalui penelitian tentang minat dan keinginan para wisatawan baik secara langsung pada calon wisatawan maupun pada biro-biro atau agen yang mengatur perjalanan wisata. Informasi mengenai latar belakang sosial ekonomi, budaya, demografi, dan psikologis (motivasi) dapat dipakai untuk menganalisis permintaan wisata dari hal ini dapat diketahui tentang kecenderungan/trend pariwisata.

Pangsa pasar pariwisata dapat dikelompokkan dalam wisata internasional (mancanegara) dan wisata domestik atau nusantara (nasional dan lokal). Dua kelompok wisatawan ini tentu mempunyai trend yang berbeda dalam berwisata. Analisis permintaan kebanyakan

berdasarkan pangsa Pasar Internasional (mancanegara), sedangkan analisis terhadap pasar wisatawan domestik sering terlupakan. Pada sisi lain wisatawan domestik merupakan potensi wisata yang besar pada masa mendatang. Dalam ancangan seharusnya potensi pasar wisata domestik perlu dipertimbangkan.

Dari profil pasar wisatawan yang ada, baik domestik maupun mancanegara, dapat ditentukan model kepariwisataan yang dikembangkan. Sebagai contoh yaitu berkembangnya wisatawan olah raga arung jeram (rafting), berdasarkan keinginan/minat dari wisatawan kelompok muda yang menyukai olah raga dan petualangan.

Analisis penawaran dan analisis permintaan pariwisata, terkait erat dengan tujuan dan kriteria kebijakan yang dikembankan dalam pembangunan wilayah. Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari pembangunan wilayah secara keseluruhan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan pariwisata adalah tata ruang. Tata ruang wilayah sesuai dengan keadaan geografisnya terutama aspek fisiografisnya. Dalam pengembangan atau pembangunan kepariwisataan aspek lingkungan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Hal ini menyangkut daya dukung lingkungan terhadap perkembangan pariwisata tersebut untuk saat sekarang dan masa mendatang.

E. Konsep Pengembangan Wilayah Sungai Sebagai Daya Tarik Wisata

Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan.

Sebuah DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sektor maupun pada tingkat DAS. Karena itu upaya untuk mengelola DAS secara baik dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemampuan produksi atau ekonomi semata, tetapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain.

Dalam menganalisa kinerja suatu DAS, kita tidak hanya melihat kinerja masing-masing komponen/ aktifitas pembangunan yang ada di

dalam DAS, misalnya mengukur produksi/produktifitas sektor pertanian saja atau produksi hasil hutan kayu saja. Kita harus melihat keseluruhan komponen yang ada, baik output yang bersifat positif (produksi) maupun dampak negatif. Karena itu dalam kajian pengelolaan DAS Terpadu ini selain dilakukan analisis yang bersifat kuantitatif, juga dilakukan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis- analisis tersebut pada dasarnya didasarkan kepada adanya keterkaitan antara suatu sektor/kegiatan pembangunan dengan kegiatan pembangunan lain, sehingga apa yang dilakukan pada satu sektor akan mempengaruhi kinerja sektor lain.

DAS bagian hulu mempunyai peran penting, terutama sebagai tempat penyedia air untuk dialirkan ke bagian hilirnya. Oleh karena itu bagian hulu DAS seringkali mengalami konflik kepentingan dalam penggunaan lahan, terutama untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pertambangan, serta permukiman. Mengingat DAS bagian hulu mempunyai keterbatasan kemampuan, maka setiap kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada bagian hilirnya. Pada prinsipnya, DAS bagian hulu dapat dilakukan usaha konservasi dengan mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan suplai air. Secara ekologis, hal tersebut berkaitan dengan ekosistem tangkapan air (catchment ecosystem) yang merupakan rangkaian proses alami daur hidrologi.

Permasalahan pengelolaan DAS dapat dilakukan melalui suatu pengkajian komponen-komponen DAS dan penelusuran hubungan antar

komponen yang saling berkaitan, sehingga tindakan pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi sudah terarah pada penyebab utama kerusakan dan akibat yang ditimbulkan, serta dilakukan secara terpadu. Salah satu persoalan pengelolaan DAS dalam konteks wilayah adalah letak hulu sungai yang biasanya berada pada suatu kabupaten tertentu dan melewati beberapa kabupaten serta daerah hilirnya berada di kabupaten lainnya. Oleh karena itu, daerahdaerah yang dilalui harus memandang DAS sebagai suatu sistem terintegrasi, serta menjadi tanggung jawab bersama.

Menurut Asdak (1999), dalam keterkaitan biofisik wilayah hulu-hilir suatu DAS, perlu adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan yang efektif seharusnya mampu merefleksikan keterkaitan lingkungan biofisik dan sosial ekonomi dimana lembaga tersebut beroperasi. Apabila aktifitas pengelolaan di bagian hulu DAS akan menimbulkan dampak yang nyata pada lingkungan biofisik dan/atau sosial ekonomi di bagian hilir dari DAS yang sama, maka perlu adanya desentralisasi pengelolaan DAS yang melibatkan bagian hulu dan hilir sebagai satu kesatuan perencanaan dan pengelolaan.
- 2) Eksternalities, adalah dampak (positif/negatif) suatu aktifitas/program dan atau kebijakan yang dialami/dirasakan di luar daerah dimana program/kebijakan dilaksanakan. Dampak

tersebut seringkali tidak terinternalisir dalam perencanaan kegiatan. Dapat dikemukakan bahwa negative externalities dapat mengganggu tercapainya keberlanjutan pengelolaan DAS bagi : (a) masyarakat di luar wilayah kegiatan (spatial externalities), (b) masyarakat yang tinggal pada periode waktu tertentu setelah kegiatan berakhir (temporal externalities), dan (c) kepentingan berbagai sektor ekonomi yang berada di luar lokasi kegiatan (sectoral externalities).

- 3) Dalam kerangka konsep “externalities”, maka pengelolaan sumberdaya alam dapat dikatakan baik apabila keseluruhan biaya dan keuntungan yang timbul oleh adanya kegiatan pengelolaan tersebut dapat ditanggung secara proporsional oleh para aktor (organisasi pemerintah, kelompok masyarakat atau perorangan) yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam (DAS) dan para aktor yang akan mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan tersebut.

Pada penanganan DAS bagian hulu diarahkan pada kawasan budidaya (pertanian) karena secara potensial proses degradasi lebih banyak terjadi pada kawasan ini. Untuk itu agar proses terpeliharanya sumberdaya tanah (lahan) akan terjamin, maka setiap kawasan pertanian atau budidaya tersedia kelas-kelas kemampuan dan kelas kesesuaian lahan. Dengan tersedianya kelas kemampuan dan kelas kesesuaian ini,

pemanfaatan lahan yang melebihi kemampuannya dan tidak sesuai jenis penggunaannya dapat dihindari.

Pengembangan kawasan pariwisata memiliki model-model atau kerangka operasional pengembangan kawasan berdasarkan konsep pengembangan dalam teori pembangunan wilayah. Pengembangan kawasan ditujukan sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Undang-Undang nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan (Bappenas, 2006): 1) pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; 2) pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; 3) pengembangan wilayah terpadu (menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal); 4) pengembangan wilayah berdasarkan klaster dengan tujuan: a) memperoleh manfaat kesejahteraan; kesempatan kerja, dan ekspor; b) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; c) berkembangnya pasar dan jaringan kerja

internasional; d) berkembangnya infrastruktur pendukung; e) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerja sama, dengan biaya transaksi yang rendah; f) tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (g) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 Tentang Sungai menyebutkan Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai memiliki arti garis batas luar pengamanan sungai. Dan Bantaran sungai memiliki arti lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

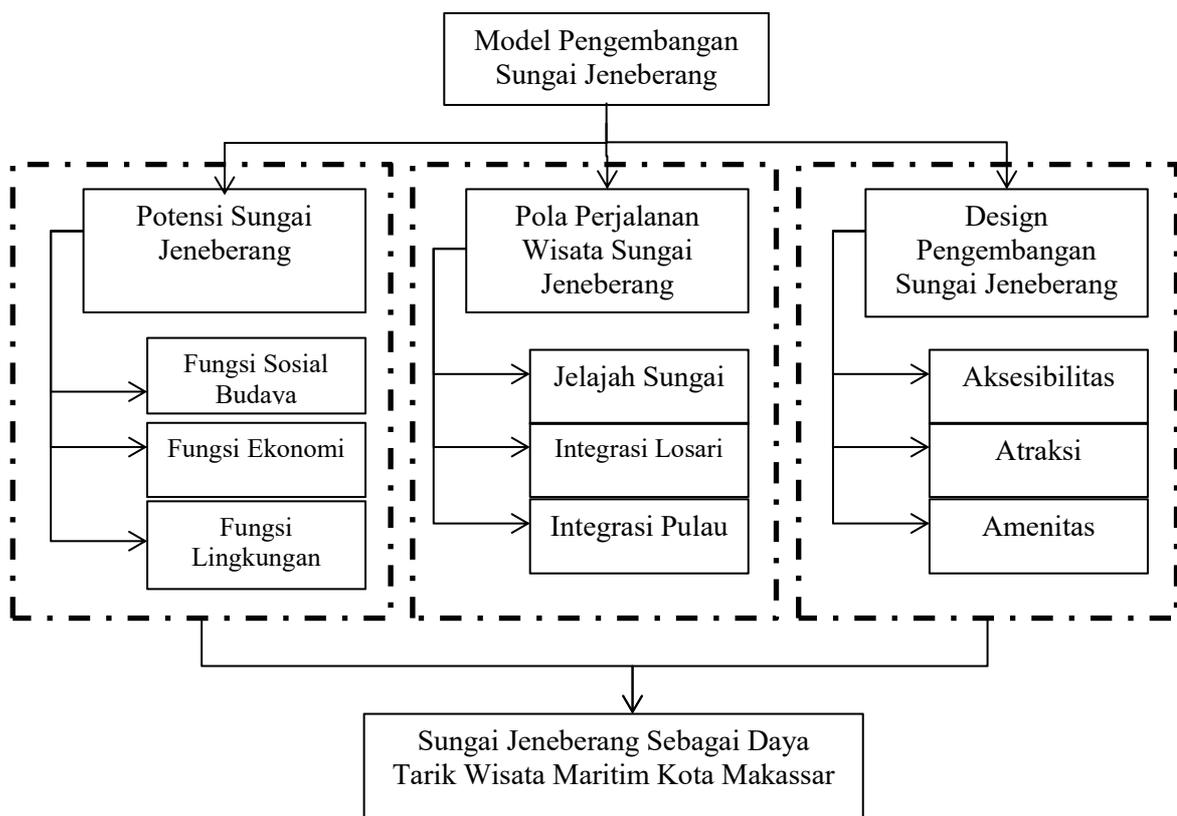
Sementara itu kaitannya dengan wisata menurut Arnould & Price dalam Aulia Afifah Nur (2017) sungai adalah salah satu ekosistem yang secara potensial dapat dikembangkan sebagai objek dan daya tarik wisata, terutama dalam kegiatan arung jeram atau rafting. Sungai merupakan salah satu dari sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam, dimana disebutkan oleh Damanik dan Weber dalam Pitana (2009) sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah: keajaiban dan keindahan alam (topografi), keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam,

ekosistem yang belum terjamah manusia, rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai), lintas alam (trekking, rafting, dan lain-lain), objek megalitik, suhu dan kelembaban udara yang nyaman, curah hujan yang normal.

F. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

Berdasarkan gambar kerangka konseptual tersebut, dianalisis potensi yang dimiliki oleh Sungai Jeneberang yang dapat dikembangkan dalam aktivitas pariwisata berdasarkan fungsinya yang terdiri dari fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan sehingga eksploitasi potensi Sungai Jeneberang dapat terus berkembang sesuai dengan fungsi dan peranannya bagi masyarakat kota Makassar. Berdasarkan analisis terhadap fungsi dasar Sungai Jeneberang, kemudian dikembangkan kajian tentang aktivitas pariwisata yang dapat dikelola dan dikembangkan pada Sungai Jeneberang dengan mengintegrasikan potensinya dengan daya tarik sekitar yang terdiri dari aktivitas jelajah sungai Jeneberang, integrasi aktivitas dengan kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon pariwisata Kota Makassar, serta integrasi dengan gugusan kepulauan Spermonde serta potensi sekitarnya seperti sungai Tallo dan Delta Lakkang.

Berdasarkan analisis dan kajian potensi alam dan aktivitas pariwisata yang potensial untuk dikembangkan pada kawasan Sungai Jeneberang, selanjutnya dilakukan kajian pengembangan dan perencanaan sarana prasarana pendukung pariwisata pada Sungai Jeneberang, meliputi perencanaan aksesibilitas, pengembangan atraksi wisata, dan penyediaan amenities pariwisata yang dapat mewujudkan kota Makassar sebagai destinasi wisata bahari yang berkualitas serta menarik minat wisatawan berkunjung ke kota Makassar sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Dalam analisis kualitatif data yang diperoleh seperti pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran melalui proses analisis untuk memahami dan menjelaskan potensi pariwisata Daerah Aliran Sungai pada muara Sungai Jeneberang yang dapat dikemas dan dikembangkan sebagai daya tarik wisata maritim provinsi Sulawesi Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan Sungai Jeneberang dan sekitarnya yang terdiri dari Muara Sungai Jeneberang, Kawasan Pantai Tanjung Merdeka, Kawasan Pantai Losari, Kawasan Sungai Tallo, Kawasan Delta Lakkang serta Kawasan Gugusan Kepulauan Spermonde.

Selain kawasan sungai, kanal dan kepulauan, kawasan wisata belanja Sombaopu, Wisata sejarah Fort Rotterdam dan Benteng Sombaopu.

Gambar 2
Lokasi Penelitian



Sumber : Data Olahan Penelitian, 2022

C. Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan potensi pariwisata (alam, sejarah dan budaya, serta buatan) atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih adalah informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar memperoleh data yang akurat. Informan penelitian di pilih secara *purposive sampling*

yaitu teknik penarikan sample secara subjektif yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan, baik dari aparat pemerintah, maupun masyarakat secara luas yang dianggap representatif dan dapat memberikan informasi yang valid yang berhubungan dengan penelitian.

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari

1. Data klimatologi yang terdiri dari data hujan, angin, kelembaban dan temperatur dari station klimatologi atau Badan Meteorologi dan Geofisika terdekat;
2. Data hidrologi terdiri dari data tinggi muka air, debit sungai, laju sedimentasi, pengaruh air balik, peil banjir dan karakteristik daerah aliran;
3. Data sistem Rupa Bumi, terdiri dari kontur, elevasi, vegetasi, kependudukan, sarana prasarana kawasan.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
6. Data Elevation Model Nasional DEMNAS-BIG
7. Data peta yang terdiri dari peta dasar (peta daerah kerja), sistem drainase dan sistem jaringan jalan yang ada, peta tata guna lahan, peta topografi masing-masing berskala antara 1 :

5.000 sampai dengan 1 : 50.000, atau disesuaikan tipologi kawasan;

8. Data kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, penyebaran data kepadatan bangunan.
9. Data Pariwisata provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari kunjungan wisatawan, trend pariwisata dan kebijakan pariwisata kota Makassar.
10. Data Wawancara dengan *stakeholder* terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan, perhatian, dan pengawasan (Moloeng, 2010). Observasi dilakukan di wilayah penelitian yaitu di Muara Sungai Jeneberang Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate serta kawasan terkait dalam kajian penelitian.
2. Wawancara, dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan sumber data/ informan penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Boedi, 2014).

3. Dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data berupa data- data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual, sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Data dokumentasi yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Dengan teknik ini peneliti dapat melakukan penjarangan data untuk mencari dan mendapatkan data-data primer melalui data arsip perencanaan, ataupun laporan laporan yang dapat mendukung penelitian.
4. Survei Lapangan dilakukan dalam tahapan proses pengambilan data berupa data spasial dan non spasial seperti titik kordinat lokasi wisata diambil dengan menggunakan GPS, foto dan video lokasi, dan data-data non spasial lainnya diambil melalui observasi dan wawancara dengan dinas atau masyarakat terkait.

F. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif kualitatif

Analisis Deskriptif kualitatif adalah metode yang bersifat penjelasan menurut karakteristik lokasi penelitian yang dilakukan sesuai tujuan penelitian dengan menggambarkan atau menguraikan secara jelas kondisi yang terjadi di lokasi

untuk lebih akurat dalam menginterpretasi digunakan instrumen berupa peta dan data yang diperoleh seperti fisik dasar wilayah, sarana prasarana dan jumlah penduduk.

2. Analisa Superimpose (Tumpang Tindih)

- a) Penggunaan dengan menentukan kawasan yang paling baik untuk pengembangan.
- b) Prinsip memperoleh lahan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (kesesuaian lahan dengan pengembangan aktifitas kawasan pesisir).
- c) Faktor penentu semua aspek fisik lingkungan dari kawasan penelitian.
- d) Metode superimpose dari berbagai keadaan dari daerah penelitian. Penilaian dilakukan atas dasar metode pembobotan dan penilaian skor (*weighting and scoring*).

BAB III

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penyusunan Masterplan Pengembangan Sungai Jeneberang Sebagai Destinasi Wisata Maritim Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., Trisutomo, S., Ekawati, S. A., Kharisma, R., Pesisir, L. W., Kota, P. S., & Jeneberang, D. S. (2017). *Karakteristik Pola Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Makassar Studi Kasus: Delta Sungai Jeneberang*. 309–318.
- Ali, Mukti & Trisutomo, Slamet & Ekawati, Aliah & Kharisma Resti. 2017. *Karakteristik Pola Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Makassar Studi Kasus: Delta Sungai Jeneberang*. Diakses pada 8 Juli 2021, <https://pasca.unand.ac.id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota>
- Anonim. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Asdak, C. 1999. "DAS sebagai Satuan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan: Air sebagai Indikator Sentral", Seminar Sehari PERSAKI DAS sebagai Satuan Perencanaan Terpadu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, 21 Desember 1999. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2006. Monografi Kota Makassar. Makassar: BPS Kota Makassar.
- 2021. Kota Makassar Dalam Angka 2021. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Damanik, Janianton., dan Weber, Helmut. (2006). *Perencanaan Ekowisata; dari Teori ke Aplikasi*. PUSPAR UGM.
- Diakomihalis, Mihail N. (2007). *Greek Maritime Tourism; Evolution, Structures and Prospects*. Dalam *Research in Transportation Economics*, 21, 419-455, Elsevier, Ltd.
- Fandeli, C. 1995. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Liberti: Yogyakarta
-1996. *Pengusahaan Ekowisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathony, Budi & Sudiro & Imananto. 2014. *Model Konservasi Sungai Mewek Studi Kasus: Sungai Mewek Kelurahan Tasikmadu Tunjung Sekar Kota Malang*. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI

- Hui, C. 2015. *Carrying capacity of the environment. International encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Second edition*, (2015): 155-160.
- Tika, Rahim, Kasim, & Sarea. 2013. Makassar Tempo Doeloe. Lembaga Kajian dan Penelitian Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.
- Mathieson, A., & Wall, G. (1982). *Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts*. Longman
- Miller, Marc L. (1993). The Rise of Coastal and Marine Tourism. Dalam *Ocean & Coastal Management*, 20, 181-199, Elsevier, Ltd.
- Mawardi, I. 2010. Kerusakan daerah aliran sungai dan penurunan daya dukung sumber daya air di Pulau Jawa serta upaya penanganannya. *Jurnal hidrosfir Indonesia* 5 (2): 1-11.
- Merigi, Karmolis (Pusat Studi Jerman). 2007. Peluang Code Utara Sebagai Objek Studi Sungai Dan Lingkungan dalam Merti Code, Focus Grup Discussion (Strategi Pemasaran Ekowisata Code Utara) 2 September 2007 di Hotel Santika diakses 2 Juli 2021 dari sumber <http://merticode.multiply.com/journal/item/17>
- Pasaribu, H.S. 1999. "DAS sebagai Satuan Perencanaan Terpadu dalam Kaitannya dengan Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Sektoral Berbasis Konservasi Tanah dan Air," Seminar Sehari PERSAKI DAS sebagai Satuan Perencanaan Terpadu dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, 21 Desember 1999. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034.
- Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumberdaya Nonhayati (PRWLSDNH). 2004. *Wisata Bahari Di Kepulauan Spermonde Makassar*. Jakarta.
- Ramly, N. (2007). *Pariwisata Berwawasan Lingkungan*. Grafindo Khazanah Ilmu
- Rosadi, Hendri, 2009, Tahun Kunjungan Wisatawan dan Pesta Rakyat Lampung Barat, diakses 2 Juli 2021 dari sumber http://lampungbarat.go.id/pemerintahan/index.php?option=com_content&task=view&id=1199&Itemid=1

- Suleman, A. R., Yusuf, H., & Hasanuddin, H. A. (2016). Study of sediment distribution for handling sedimentation in Jeneberang Estuary Makassar South Sulawesi Province. *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences*, 11(7), 4431–4438.
- Wright, T. (2015). Water, Tourism, and Social Change: A Discussion of Environmental Perceptions in Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 5(1), 1–22. <https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:683557>
- Yulianda F. 2007. Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi. Institut Pertanian Bogor.

